



INFORMASI PUBLIK:  
*Hak Anda untuk tahu!*  
www.kip.bantenprov.go.id

# KLIPING KORAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Halaman 1. dari 2.

Harian Nasional :  Kompas  Media Indonesia  Seputar Indonesia  
 ..... (lainnya)

Harian Lokal :  Radar Banten  Kabar Banten  Satelit News  
 Banten Pos  ..... (lainnya)

Hari/Tanggal : Senin, 2 Januari 2023 Halaman Koran : 1.....

## Potensi Bencana Wajib Dibuka, Alat EWS Hilang Dicuri

SERANG, BANPOS – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten meminta agar instansi yang berwenang terkait dengan potensi bencana, dapat membuka informasi tersebut kepada publik. Sebab,

informasi potensi bencana merupakan informasi dengan kategori serta merta, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun sayangnya, disisi lain, alat Early Warning System (EWS) justru

banyak yang tidak berfungsi bahkan hilang, padahal alat tersebut merupakan salah satu sumber informasi bencana yang penting.

Ketua KI Provinsi Banten, Toni Anwar

Mahmud. Toni mengatakan bahwa harus dibukanya informasi potensi bencana itu mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pada Pasal 10, diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dimana Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta

BACA **POTENSI HAL - 9**

## KLIPING KORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

INFORMASI PUBLIK:

*Hak Anda untuk tahu!*

www.kip.banteng.go.id



# Potensi Bencana...

Sambungan dari Halaman 1

suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum," ujarnya melalui pesan singkat kepada BANPOS, Minggu (1/1).

Toni menuturkan bahwa informasi yang disampaikan itu, harus dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, pada Pasal 19 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2021 menjelaskan lingkup informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

"Meliputi informasi bencana alam, informasi keadaan bencana nonalam, informasi bencana sosial, informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik," katanya.

Berdasarkan hal tersebut, KI Provinsi Banten mengajak dan mengimbau kepada instansi berwenang, untuk dapat menyampaikan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan, yang telah diolah melalui proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun analisis melalui kaidah ilmiah.

"Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi perbedaan persepsi masyarakat atas suatu informasi, yang justru menimbulkan kepanikan dan kegaduhan dalam hal terjadinya perbedaan informasi dari dua badan publik (instansi pemerintah) dalam mengumumkan informasi serta merta," jelasnya.

Hal itu mengacu pada persoalan perbedaan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset Nasional (BRIN) terkait dengan potensi badai di akhir tahun 2022 lalu.

Perbedaan informasi itu sempat membuat geger publik. Selain itu, prediksi cuaca tersebut bahkan menjadi bahan olok-olok dari para warganet, yang menggambarkan perbedaan prediksi tersebut sebagai pertarungan antara BMKG dan BRIN.

Maka dari itu, KI Provinsi Banten pun meminta agar masyarakat dapat lebih teliti dalam menyikapi informasi yang beredar di media. Masyarakat diminta untuk memastikan bahwa informasi itu memang disampaikan oleh instansi yang berwenang.

"Masyarakat harus memastikan sumber informasi adalah memang instansi yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah, untuk menyampaikan informasi serta merta. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah swt dan diberikan keselamatan," tandasnya.

Terpisah diketahui, dua unit Early Warning System (EWS) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang terpasang saat ini tidak berfungsi.

Bahkan menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon Nikmatullah salah satu alat deteksi bencana itu kini rusak akibat ulah pencuri, dimana perangkat pada bagian alat ini hilang sehingga menyebabkan kerusakan dan tidak dapat berfungsi. Kedua EWS ini terpasang di wilayah Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Grogol.

"Memang waktu itu saya melihat yang di Ciwandan itu rusak, rusaknya tuh akibat ada yang nyuri di dalam rangkanya," kata Nikmatullah belum lama ini.

Kendati salah satu alat peringatan bencana gempa bumi dan tsunami dalam kondisi rusak lantaran banyak perangkatnya yang hilang, Nikmatullah menambahkan, pihaknya selalu waspada melakukan kesiapsiagaan apabila terjadi gempa bumi. "Masih ada berdiri masih, perangkat dalamnya banyak yang hilang," tuturnya.

Di sisi lain, Nikmatullah mengatakan, pihaknya pernah mengajukan untuk pengadaan alat peringatan bencana. Namun karena harganya yang mahal, usulan itu belum terlaksana. Dia berharap, kedepan pihaknya bisa kembali memasang alat peringatan dini terkait kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

"Sebelumnya pernah mengajukan tapi karena harganya terlalu tinggi, dan ininya (Anggaran-Red) tidak mencukupi, ya berarti belum sampai sekarang," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta mengaku kaget dengan adanya informasi alat pendeteksi bencana tsunami milik BPBD Kota Cilegon hilang dicuri pihak tak bertanggung jawab. Sanuji mengaku akan memanggil BPBD mencari tahu mengapa alat EWS itu hilang dicuri.

"Kok bisa? Secepatnya saya dengan Pak Walikota (Helldy Agustian) akan memanggil pihak BPBD Cilegon soal hal ini. Kami ingin tahu, apakah selama ini tidak dirawat? atau tidak dijaga oleh pihak kelurahan atau RT/RW?. Tapi, kami perlu pelajari dulu," kata Sanuji.

Dikatakan Sanuji dengan kondisi saat ini, jika pengadaan alat sirine Early Warning System sudah tidak mungkin bisa dilakukan pada 2022, kemungkinan pengadaan alat tersebut baru akan bisa direalisasikan di 2023 mendatang.

"Kalau di 2022 nggak mungkin bisa terealisasi. Kalau pun ada, harus ada kerja sama antara pemerintah dengan pihak industri. Karena alat tersebut untuk menjaga industri dalam menghadapi bencana. Jadi, saya berharap, ada sinergi antara pemerintah dan industri untuk membeli alat sirine Early Warning System," tandasnya. (LUK/DZHP/BN)